



Rencana Kerja

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019**

DISKOMINFO
KAB. KUTAI KARTANEGARA

Jalan Pahlawan No. 1 Kelurahan Timbau Tenggarong 75511
Website : diskominfo.kutaikartanegarakab.go.id
Email : diskominfo@kutaikartanegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA tahun 2019 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ir. H. BAHTERAMSYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620327 198603 1 023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD.....	6
2.2. Analisi Kinerja Pelayanan PD	21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	70
3.3. Program dan Kegiatan	71
BAB IV. PENUTUP	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2019.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal



penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
- n. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- p. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) ;
- q. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
- r. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menyesuaikan dengan lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
3. Program dan Kegiatan

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep **Value for Money**. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan)



Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaik-baiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian / penilaian.

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Diskominfo Kutai Kartanegara tahun 2019. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output.



Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Diskominfo Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target Kinerja Program/ Kegiatan antara lain:

1. Keterbatasan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
3. Belum dilaksanakannya Tata kelola pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien;
4. Kurangnya Koordinasi Dalam Penyusunan Program;
5. Masih rendahnya Pemahaman Terhadap pengelolaan sumber daya Komunikasi dan Informatika;



6. Regulasi Kewenangan belum terimplementasikan Secara Optimal;
7. Keterbatasan Kwantitas dan Kapasitas Sumber Daya;
8. Belum Tertatanya pola arus data informasi antar instansi;
9. Belum Adanya Standarisasi Pengelolaan Konten dan Strategi Penyebaran Informasi;
10. Keterbatasan anggaran;
11. Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
12. Inkonsistensi penempatan SDM dengan Kompetensi yang dimiliki.

Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Kabupaten	Capaian Sasaran Renstra Kabupaten	Sasaran pada Renstra Kominfo
1.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan berbasis TIK	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK	-	Mendorong penciptaan SDM unggul di bidang Komunikasi dan informatika
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	-	
3.	Jumlah Jenis Dokumen Operasional Pencapaian Kinerja	Tersedianya dokumen operasional yang mendukung capaian kinerja	-	
4.	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pos	Tersedianya instrumen penyelenggaraan pos dan	-	



	dan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	telekomunikasi		
5.	Jumlah Rekomendasi Teknis Untuk Perijinan Pos/ Jasa Titipan	Meningkatnya Pengelolaan Pembinaan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	-	
6.	Jumlah Sosialisasi /Pembinaan Penyelenggaraan Postel		-	
7.	Jumlah Rekomendasi Teknis Untuk Perijinan Penggelaran Kabel untuk keperluan Telekomunikasi di jalan kabupaten kota		-	
8.	Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perijinan Kantor Cabang dan loket pelayanan operator		-	
9.	Jumlah infrastruktur / Pos / Jasa Titipan	Terwujudnya Infrastruktur pendukung Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	-	Meratanya Pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia



10	Jumlah Infrastruktur Pendukung (data penggelaran kabel untuk keperluan telekomunikasi di jalan Kabupaten/Kecamatan	-	-	-
11	Jumlah Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi Lainnya	-	-	-
12	Jumlah penyebaran informasi	Terwujudnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab	-	-
13	Jumlah kerjasama dengan media elektronik dan media non elektronik	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media	-	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatamn informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
14	Jumlah jenis layanan informasi	Terlaksananya pelayanan informasi pada masyarakat	Tersebar nya informasi penyelenggara an Pemerintah Daerah bagi	Tersedianya dan tersebar nya informasi yang faktual dan berimbang ke



			masyarakat	seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI
15	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	Tersedianya instrumen perencanaan dan pengendalian Telematika	-	-
16	Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan komunikasi data dan layanan video conference	Terselenggaranya jaringan komunikasi data lingkup se Kabupaten	-	-
17	Jumlah sumberdaya aparatur yang dilatih pemanfaatan TIK	pembinaan teknologi informasi dan komunikasi bagi Sumberdaya aparatur dan kelompok masyarakat melalui bimbingan teknis dan pengenalan internet secara <i>mobile</i>	-	-
18	Jumlah anggota masyarakat (termasuk murid sekolah) yang difasilitasi akses TIK/Internet		-	-
19	Jumlah fasilitasi penerapan TIK yang dilakukan		-	-
20	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	Tersedianya aplikasi pendukung e-government	-	-
21	Jumlah paket yang dilelangkan	Terlaksananya e-procurement	-	-
22	Jumlah rekanan yang terdaftar		-	-
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan		-	-



	e-procurement			
24	Jumlah pengembangan penyempurnaan SPSE		-	-
25	Jumlah pengguna LPSE yang dilatih	Terlaksananya peningkatan kemampuan pengguna	-	-
26	Jumlah website OPD yang aktif dalam pengelolaan data	Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web	-	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
27	Jumlah pengunjung website pemerintah Kabupaten		-	-
28	Jumlah konten pada website pemerintah Kabupaten		-	-
29	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dibangun dan dikembangkan	Tersedianya aplikasi pengelolaan data secara elektronik	-	-



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2018)	
					Target Renja - PD tahun 2017	Realisasi Renja - PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11= (10/4)
	Urusan : Wajib									
	Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika									
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	18,500 lembar	TDI	700 Lembar	525 Lembar	94,40	600 lembar	1.300 lembar	7
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan air dan listrik	60 bulan	TDI	12 Bulan	12 Bulan	100.00	12 Bulan	24 Bulan	40
5.2.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	140 unit	TDI	28 Unit	28 Unit	100.00	15 Unit	43 unit	31
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan	205 Orang	TDI	41 Orang	41 Orang	100.00	51 Orang	92 orang	44



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis kebersihan kantor	125 jenis	TDI	25 Jenis	25 Jenis	100.00	20 Jenis	45 Jenis	36
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	175 jenis	TDI	78 Jenis	35 Jenis	100.00	35 Jenis	70 jenis	40
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	250,000 lembar	TDI	3.643 Lembar	2,580 Lembar	70,82	2.660 Lembar	7.286 lembar	2,1
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	53570 Exp	TDI	0 Exp	0 Exp	0.00	0 exp	0 Exp	0
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	30,000 kotak	TDI	600 Kotak	450 Kotak	92.89	600 kotak	1.200 kotak	4
5.2.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	750 kali	TDI	27 Kali	23 Kali	98.70	64 kali	91 Kali	12
5.2.01.20	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah bulan adm teknis perkantoran	7.800 Orang	TDI	66 Orang	66 Orang	100.00	64 Orang	130 orang	1.6
5.2.01.21	Penyediaan Bandwith	MBps	1,000 Mbps	TDI	200 Mbps	150 Mbps	64.09	200 Mbps	400 Mbps	25
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	100%							
5.2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	25 jenis	TDI	6 jenis	2 jenis	24.32	5 jenis	11 jenis	44
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan	60 bulan	TDI	1 gedung	gedung	-	0	0	0
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kedaraan yang terpelihara	140 unit	TDI	20 Unit	16 Unit	71.03	26 Unit	46 Unit	32
5.2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang terpelihara	60 bulan	TDI	12 Bulan	8 Bulan	96.85	12 Bulan	24 Bulan	40
5.2.02.45	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mekanikal Elektrikal	Jumlah Kecamatan yang terpelihara	90 Kec	TDI	18 kecamatan	16 kecamatan	64.90	18 kec	36 kecamatan	40
5.2.02.46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan ICT Kab. Kukar	Jumlah SKPD yang terpelihara dengan Jaringan ICT	500 SKPD	TDI	100 SKPD	100 SKPD	99.92	81 SKPD	181 SKPD	36.2



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

5.2.02.47	Sewa Disaster Recovery Center (DRC)	Jumlah Terabyte (TB)	20 TB	TDI	10 terabyte	10 terabyte	-	0	0	0
5.2.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100%							
5.2.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	375 stel	TDI	15 stel	Stel	-	0	0	0
5.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					100 %		
5.2.06.135	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah berkas laporan keuangan	20 berkas	TDI	1 dokumen	4 Berkas	0	0	0	20
5.2.06.136	Penyusunan Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen	2 dokumen	TDI	1 dokumen	1 dokumen	0	0.00	0	50
5.2.06.137	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah Dokumen	25 dokumen	TDI	5 dokumen	5 dokumen	98.17	3	8	32
5.2.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan E-Government	100%					100 %		
5.2.15.07	Pengembangan Smart City	Jumlah Aparatur pada OPD yang dilatih	Aparatur	TDI	300 Aparatur	102 Aparatur	34.52	55 Aparatur	355	0
5.2.15.08	Publikasi Kepala Daerah	Jumlah Layanan Publikasi Kepala Daerah		TDI	12 Bulan	12 Bulan	-	0.00	0	0
5.2.15.09	Kerja sama IT Security Assessment Lemsaneg	Jumlah dokumen keamanan data	2 dokumen	TDI	1 dokumen	0 dokumen	0	0.00	0	0
5.2.15.10	Pengelolaan dan Peningkatan Infra Struktur Data Center/NOC	Jumlah server yang dikelola		TDI	1 server	1 server	0	0.00	0	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

5.2.15.11	Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Jumlah kecamatan yang mendapat pembinaan persandian		TDI	14 kecamatan	- kecamatan	-	0.00	0	0
5.2.15.12	Penataan dan Pembinaan Bidang Pos (lanjutan)	Jumlah kecamatan yang terbina	4 kecamatan	TDI	8 kecamatan	- kecamatan	-	0.00	0	0
5.2.15.13	Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat Video Convergence	Jumlah tempat yang dipelihara dan ditingkatkan	22 titik	TDI	24 titik	- titik	-	0	0	0
5.2.15.14	Pameran Pembangunan	Jumlah pameran	35 kali	TDI	4 kali	4 kali	0	0	0	0
5.2.15.15	Implementasi dan Pengembangan e-Government	Jumlah peserta	250 peserta	TDI	50 SKPD	50 Peserta	0	0	0	0
5.2.15.16	Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Jumlah peserta	50 peserta	TDI	100 SKPD	- SKPD	-	0	0	0
5.2.15.17	Pengembangan Jaringan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan jaingannya	8 kelurahan	TDI	2 kelurahan	- kelurahan	-	0	0	0
5.2.15.18	Pembuatan Master Plant Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemkab Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Master Plan TIK	2 dokumen	TDI	1 dokumen	- dokumen	-	0.00	0	0
5.2.15.19	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen Tata Naskah dan Perda TIK	4 dokumen	TDI	2 dokumen	- dokumen	-	0.00	0	0
5.2.15.20	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Fiber Optic (FO)	Jumlah Km jaringan FO yang dikembangkan	55 Km	TDI	25 Km	- Km	-	0	0	0
5.2.15.21	Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	Jumlah UMKM	30 UMKM	TDI	10 UKM	10 UKM	0	0	10	0
5.2.15.22	Optimalisasi Jaringan SKPD	Jumlah SKPD yang dioptimalkan jaringannya	100 SKPD	TDI	20 SKPD	- SKPD	-	0	0	0
5.2.15.23	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Aplikasi LPSE	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	14 aplikasi	TDI	3 Aplikasi	-Aplikasi	-	0	0	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

5.2.15.24	Implementasi Penggunaan Aplikasi LPSE	Jumlah SKPD yang mengikuti penggunaan aplikasi LPSE	101 SKPD	TDI	100SKPD	- SKPD	-	0	0	0
5.2.15.25	Peningkatan Standarisasi LPSE dan ISO 9001 : 2008	Jumlah dokumen standarisasi LPSE dan ISO 9001 : 2008	1 dokumen	TDI	1 dokumen	1 dokumen	0	0.00	0	0
5.2.15.26	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Free Hotspot	Jumlah core (satuan FO)	70 titik	TDI	20 titik	- titik	-	0	0	0
5.2.15.27	Penataan, Pembinaan, Pengawasan, Pembinaan dan Perizinan Bidang Telekomunikasi	Jumlah dokumen penataan pembinaan dan pengawasan Telekomunikasi	1. Penataan infrastruktur menara telekomunikasi di Kab. Kukar, 2. 40 Rekomendasi IMB menara telekomunikasi, 3 Peningkatan retribusi menara, 4. Draft ijin galian kabel	TDI	4 dokumen	4 dokumen	0	0.00	0	0
5.2.15.28	Implementasi PPID Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah implementasi PPID	102 kali	TDI	50 SKPD	45 SKPD	0	0.00	0	0
5.2.15.29	Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-undangan Kominfo	Jumlah sosialisasi dan advokasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Sebanyak 35 kali	TDI	17 kecamatan	- kecamatan	-	0.00	0	-
5.2.15.30	Penguatan Pengelolaan PPID Pembantu SKPD	Jumlah rapat anggota PPIDP	diadakannya pertemuan/rapat seluruh anggota PPIDP sebanyak 15 kali	TDI	30 PPID	- PPID	-	0.00	0	-



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

5.2.15.31	Penyediaan dan Instalasi, Konfigurasi Perangkat Core Switching	Jumlah SKPD yang mendapat pemeliharaan instalasi	10 SKPD	TDI	10 SKPD	- SKPD	-	0.00	0	-
				TDI						
5.2.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	<i>Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Layanan SKPD</i>						0		
5.2.17.02	Implementasi dan Pengembangan IGOS	Jumlah peserta	125 peserta	TDI	25 sekolah	- sekolah	-	0	0	-
5.2.19	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	<i>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM</i>					-	0		
5.2.19.01	Penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang terbina	50 KIM	TDI	1 kali Pameran	- kali pameran	0	0	0	-
5.2.20	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional					-	100 %		
5.2.20.01	Desiminasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui BlockingSpace	Jumlah Media Informasi yang tersedia		TDI	25 Media	15 Media	28.24	0	25 media	-
5.2.20.01	Penguatan Pertunjukan Rakyat sebagai Media Desiminasi Informasi	Jumlah pertunjukan rakyat	20 pertunjukan	TDI	3 pertunjukan	- pertunjukan	-	0	0	-
5.2.20.02	Penguatan Kualitas Program siaran radio RPK	Jumlah berita		TDI	21 liputan	- liputan	-	0.00	0	-



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

5.2.20.03	Pembuatan Naskah Akademik dan Perda LPPL RPK	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda LPPL RPK	2 dokumen	TDI	1 dokumen	1 dokumen	0	0.00	0	0
5.2.20.04	Pengawasan dan Monitoring Radio dan Televisi	Jumlah kecamatan yang terbima dan pengawasan radio TV Kabel	25 kecamatan	TDI	6 kecamatan	- kecamatan	-	0.00	0	0
5.2.20.05	Pengelolaan News Room Diskominfo Kab. Kukar	Jumlah berita	27.600 berita	TDI	490 artikel	- artikel	-	0.00	0	0
5.2.20.06	Pengembangan Website kutaikartanegarakab.go.id	Jumlah berita melalui website kutaikartanegara.go.id	772 berita	TDI	1 domain	- domain	-	0.00	0	0
5.2.20.07	Ekspose Multimedia Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah expose Multi Media	960 kali	TDI		-	-	0	0	0
5.2.20.08	Pembuatan dan Pengembangan Video Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah video profile	750 buah	TDI	1 video profil	150 Buah	0	0	0	0
5.2.20.09	Pengelolaan Website diskominfo.kutaikartanegara.go.id	Jumlah website yang terpelihara	5 website milik pemma	TDI	1 website	1 website	0	0	0	0
5.2.20.10	Peliputan dan Publikasi melalui TV Kabel	Jumlah liputan dan dokumentasi	920 kali	TDI	100 kali	100 kali	0	0	0	0
				TDI						
5.2.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah		TDI						
5.2.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Meningkatnya Informasi Data dan Statistik Daerah		TDI	2 dokumen	1 dokumen	80.82	0	0	-
5.2.15.03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Meningkatnya Data Dan Informasi		TDI	2 dokumen	1 dokumen	91.71	0	0	
5.2.15.05	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Meningkatnya Data Dan Informasi		TDI	2 dokumen	1 dokumen	78.22	0	0	-



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

A. KEDUDUKAN :

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

B. TUGAS :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

C. FUNGSI :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan ;
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan ;
- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik terdiri dari :
 - Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik ;
 - Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik ;
 - Kepala Seksi Layanan Informasi Publik ;
- d. Bidang Komunikasi Publik terdiri dari :
 - Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik ;
 - Kepala Seksi Hubungan Media ;
 - Kepala seksi Sumber Daya Komunikasi Publik ;
- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
 - Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi ;
 - Kepala Seksi Persandian ;
- f. Bidang e-Government ;
 - Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi ;
 - Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government ;
 - Kepala Seksi Tata Kelola e-Government ;



g. Bidang Statistik

- Kepala Seksi Data Statistik Sektor ;
- Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik Sektor ;
- Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Data Statistik Sektor ;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2016 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah utama dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1. Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara SmartCity.

Secara garis besar pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara di era sekarang ini sangat diperlukan guna pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan pengembangan kota cerdas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirancangnya membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya pengelolaan Sumber Daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi. Pengembangan aplikasi yang ada pada setiap SKPD untuk dapat mengintegrasikan data layanan informasi.



2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi. Sistem pengadaan yang dibangun merupakan media bagi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah. Fungsi fasilitasi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik untuk pengguna layanan meliputi PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), PP (Pejabat Pengadaan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Auditor dan Penyedia.

Dalam peningkatan layanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai diamanatkan dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 9 Tahun 2015 tentang peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, diwajibkan untuk semua Layanan pengadaan secara elektronik untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh LKPP. Standar tersebut ada 17 standar yang harus dipenuhi meliputi diantaranya standar organisasi, layanan, keamanan informasi, pengelolaan server serta pengelolaan sumber daya manusia.

3. Satu Data Layanan untuk Pembangunan Kutai Kartanegara

Data yang digunakan oleh aplikasi yang saat sekarang dikembangkan di beberapa SKPD belum memiliki keseragaman struktur dikarenakan belum adanya standar baku yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam



membangun/mengembangkan aplikasi yang sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.

Kondisi ini menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses integrasi data. Untuk itu pemerintah harus memiliki standar baku yang disepakati bersama yang dapat dijadikan patokan dalam setiap pembuatan/pengembangan aplikasi di setiap SKPD.

Integrasi data merupakan sebuah proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber dalam rangka mendukung manajemen Informasi dan mendukung penggunaan untuk melihat kesatuan data.

Integrasi data mengharuskan semua komponen menggunakan sumber data yang sama yang sudah terverifikasi oleh instansi terkait dan menghindari terjadinya duplikasi atau adanya data ganda.

4. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama di segala aspek.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui berbagai aplikasi yang bersifat On-Line.



5. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Informasi adalah keterangan, ernityataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dengan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Setiap informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses serta alasan pembuatan kebijakan publik. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik, seperti yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tingginya kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat dewasa ini, dengan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan akses internet melalui jaringan free WiFi dan jaringan 4G, alat teknologi penunjang kemudahan transaksi dan kemampuan bertukar data



digital secara jarak jauh melalui internet menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita sedang memasuki tahap sebagai masyarakat informasi. Ini adalah salahsatu bukti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.



2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

TABEL 2.3
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
			Internal (Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Paket lelang Barang dan Jasa sudah mencapai 100%	1.UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2.UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perbup No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan UPT LPSE	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE, Pendampingan Pengguna	Kurangnya Peran Aktif dari SKPD Dalam menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tidak Ada Sangsi Bagi SKPD Yang Tidak Aktif dalam Menyampaikan RUP	Kurangnya Sarana dan Prasarana Kurangnya Jumlah dan Kapasitas SDM
Peningkatan Infrastruktur <i>e-government</i>	Terselenggara-nya infrastruktur	1.UU No. 11/2008 tentang Informasi	Status keberadaan jaringan sudah menggunakan	Besaran alokasi anggaran tidak	- Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke seluruh OPD Kabupaten Kutai Kartanegara (56 Unit Kerja)	dan Transaksi Elektronik; 2. Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i>	mekanisme penganggaran	pasti setiap tahunnya	kualifikasi
	Terselenggara-nya infrastruktur jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke 18 Kecamatan	Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>e-Government</i>		Besaran alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya	Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi
	Terselenggara-nya infrastruktur jaringan WAN kecamatan berbasis VPN <i>Instant</i> ke 237 Desa / Kelurahan			Besaran alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya	Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi
	Penyediaan Bandwith Internet		Menetapkan Kapasitas bandwidth aberdasarkan jumlah aplikasi dan data yang digunakan oleh pemkab		Keterbatasan Anggaran



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

			Kabupaten Kutai Kartanegara		
	Tersedianya Pelayanan Video Conference di 18 Kecamatan + 2 SKPD		Pemeliharaan Perawatan Video conference		
	Belum Terlaksananya edukasi literasi TIK bagi aparatur dan masyarakat melalui sarana dan prasarana TIK		Sosialisasi & Bimtek		Saranan dan Prasana Bimtek Alokasi Anggaran Tidak Pasti
	Belum Adanya Perda TIK Penyelenggaraan Kominfo;		Penyusunan Naskah Akademik & Draft Perda		Terbatasnya Dana
	pembinaan, monitoring dan evaluasi telematika belum optimal				Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi
	Belum Adanya SOP Tata kelola TIK dan Keamanan Informasi				Terbatasnya Dana
	Belum				



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	terintegrasinya layanan Data				
	Pelaksanaan layanan kumpulan data melalui pemanfaatan infrastruktur e-government		- Sudah memiliki aplikasi terintegrasi dan - Sudah memiliki aplikasi	Belum optimalnya up dating data dari OPD bersangkutan	Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi
	Koordinasi interoperabilitas implementasi pengembangan e-government		Sudah memiliki aplikasi data tak terstruktur	Belum tersosialisasi nnya aplikasi pada OPD	Keterbatasan anggaran
	Fasilitasi <i>hosting website</i>		Pergub No. 7/2009 Tentang Pendayagunaan <i>WebSite</i> di Lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara	Memiliki kewenangan dalam pengaturan <i>hosting website</i>	Masih ada sebagian OPD yang belum hosting ke website kutaikartanegara kab.go.id
Penata Kelolaan Telekomunikasi	Penggelaran kabel di jalan Kab.Kutai Kartanegara	1. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.Permenkominfo No. 23/2009 Tentang	Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas penggelaran kabel		
	Data kantor cabang dan loket pelayanan operator		Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas kantor cabang loket		



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

		Usaha Jasa Titipan 3.Perda 29/2010	pembayaran operator		
	Identifikasi telsus tanpa menggunakan frekuensi	Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan informatika.	Belum adanya juklak/juknis untuk memproses legalitas		
	mekanisme pengukuran frekuensi		memproses legalitas		
	Belum adanya tupoksi pengelolaan pendapatan		Belum merupakan kewenangan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika		
Peningkatan dan Penatakelolaan Bidang Persandian					
Optimalisasi Sarana Komunikasi	Termanfaatkan nya LPPL “Radio RPK FM”. Dan Lembaga Penyiaran Swasta serta Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan	Bagian kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengkoordinasi dan memanfaatkan lembaga penyiaran	LPP mempunyai segmentasi program tersendiri	Perlu adanya koordinasi dalam menyamakan antara kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segmentasi program Lembaga Penyiaran



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

		dan Pengelolaan Kominfo.			
	Pembinaan dan Pengawasan Media Penyiaran				
	Termanfaatkan-nya media cetak sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. UU No. 40/1999 Tentang Pers; 4. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo			
	Termanfaatkan ya Lembaga Komunikasi Sosial Lembaga Komunikasi Pedesaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media Diseminasi Informasi	1.UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaa UU No. 14 Tahun 2008; 4. Perda No. 29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo.			
Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan	Telah terbentuk PPID dan PPID Pembantu di	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Kepgub No.			



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID P)	lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	489/Kep-487-Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan PPID, 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik			
Layanan Rekomendasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis Penyiaran	Proposal permohonan ijin melalui Kementerian Kominfo dan KPID	Keputusan Menkominfo No. 18/2008 tentang Tata Cara Proses Perijinan Penyiaran di Daerah	Kurangnya Sosialisasi Kepmenkominfo No. 18 Tahun 2008	- Pemohon perijinan tidak banyak yang mengetahui bahwa proses perijinan untuk TV harus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ; - Forum rapat bersama (FRB) untuk menetapkan ijin revisi mengabaikan persyaratan adanya rekomendasi kelengkapan administrasi dan teknis dari Dinas Komunikasi dan	Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi dan teknis



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

				Informatika	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Telah Terbentuk 50 KIM	Permen Kominfo No. 08 PER/M.KOMINFO /6/2010	Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan & Fasilitas Komputer, Pendampingan	Pembinaan KIM merupakan kewenangan dari kabupaten/kota	Kurangnya Sarana dan Prasarana dan Minimnya Dana
Pembinaan dan Pemberdayaan Pertunjukan Rakyat (Petunra)	Belum terbinanya Pertunra secara Sistematis	Kominfo No. 08 PER/M.KOMINFO /6/2010	Bimtek, Pendampingan		
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)	Belum terbentuknya Bakohumas		Pergub Bakohumas masih dalam proses penetapan	OPD Provinsi, kab/kota, BUMN, BUMD dan lembaga vertikal belum mengetahui mengenai pembentukan Bakohumas	Belum terkoordinasikan-nya informasi program-program pemerintah
Aplikasi Layanan Informasi Publik	Telah terbangun aplikasi layanan informasi publik				
Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai 91 orang dengan	UU No. 8/1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian	Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai	Kebijakan Penempatan Pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas



	kompetensi Teknis yang terbatas	sebagaimana telah diubah dengan UU No.43/1999			
Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya ruang Server, Ruang Internet Publik/Media Center, Ruang Workshop, Ruang Kerja Pegawai,		Prioritas Penentuan Kegiatan	Kebijakan Penganggaran	Masih terbatasnya sarana dan prasarana



2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kada, Cpaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT</i>			
1	Program Satu RT Satu Komputer	Belum Adanya Juklak dari leading sektor	Tidak adanya data RT yang valid	Kerjasama dengan instansi terkait
2	Program Integrasi Sistem E- Government	Belum terintegrasinya Sistem E- Government	Berbedanya source aplikasi disetiap SKPD	Perlu adanya dasar hukum dalam menstandarisasi pembuatan aplikasi disetiap SKPD.
3	Audit Kinerja	Belum Adanya Juklak dari leading sektor	Masih bersifat manual.	Terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan disemua bidang.



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN			
1	Program Kampung Pintar	Belum tersedianya data Kampung	Data belum terintegrasi	Perlu adanya dasar hukum dalam menstandarisasi pembuatan aplikasi disetiap SKPD.
2	Program Kabupaten Kutai Kartanegara Sehat (Lanjutan)	Kurangnya koordinasi	Kurangnya informasi ke Masyarakat	Meningkatkan publikasi informasi ke Masyarakat
3	Program Nebas Tapak Kemiskinan	Belum tersedianya data kemiskinan	Data belum terintegrasi	Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pembuatan digitalisasi data kemiskinan
	MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1	Program PAD Cerdas	Meningkatnya PAD	Terbatasnya SDM Masyarakat di bidang IT	Melatih SDM Masyarakat tentang IT
2	Program Kerja sama investasi dengan Badan Usaha dalam	Perlunya Kerjasama dengan Badan	Belum maksimalnya kerjasama dengan Badan Usaha	Penyediaan fasilitas informasi dan publikasi peluang



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	penyediaan infrastruktur Daerah	Usaha		investasi
3	Program Kerjasama Pengelolaan Aset Potensial Daerah	Kurang lengkapnya data aset daerah yang akurat	Kurangnya koordinasi antar SKPD	Penyediaan fasilitas informasi dan publikasi potensi aset daerah
4	Integrasi CSR	Belum adanya data CSR	Kurangnya koordinasi SKPD terkait	Tersedianya data pihak swasta yang melaksanakan CSR
	MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH			
1	Program Penguatan BUMD; Penguatan Seluruh BUMD Secara Bersama-sama agar dapat saling menunjang untuk mencetak laba dan dapat berkinerja lebih tinggi	Belum adanya data BUMD	Kurangnya koordinasi SKPD dan BUMD	Tersedianya data BUMD
2	Program Jonok Ngan Kabupaten Kutai Kartanegara Membangun Pusat	Belum terpenuhinya fasilitas IT di tempat Wisata	Kurangnya fasilitas IT di tempat wisata	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas IT



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Rekrasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam Satu Kawasan Waduk Panji Sukarame dan Museum Kayu			
3	Program Jonok Ngan Kabupaten Kutai Kartanegara Memperkuat Destinasi Wisata Pulau Kumala	Belum terpenuhinya fasilitas IT di tempat Wisata	Kurangnya fasilitas IT di tempat wisata	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas IT
4	Revitalisasi Museum Mulawarman	Belum terpenuhinya fasilitas multimedia di Museum Mulawarman	Tidak adanya fasilitas multimedia di Museum Mulawarman	Kerjasama dengan pihak provinsi dalam penyediaan fasilitas multimedia
5	Membangun dan Mengembangkan destinasi Wisata berbasis Eko wisata	Belum terpenuhinya fasilitas IT di tempat Wisata	Kurangnya fasilitas IT di tempat wisata	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas IT
	MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH			
1	Program Pembangunan Bandar udara dan Smartcity	Belum adanya infrastruktur Smart City	Belum adanya RoadMap Smart City	Pembuatan RoadMap dan koordinasi dengan semua SKPD



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

2	Program Tower Pintar	Belum maksimalnya fasilitas IT di wilayah Kutai Kartanegara	Terbatasnya Infrastruktur IT	Penyediaan dan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas IT
	MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Program Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender dan Partisipasi Politik Perempuan	Belum tersedianya data kesetaraan gender	Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait	Terpenuhinya data kesetaraan gender berbasis IT
2	Menyediakan Fasilitas Pendukung dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak serta bagi masyarakat berkebutuhan khusus di area publik	Belum tersedianya fasilitas IT	Kurangnya fasilitas IT di area publik	Terpenuhinya fasilitas IT di area publik



2.3.4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan smart city	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal	Sinkronisasi program belum terwujud	Telah adanya dukungan regulasi pendukung



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4,300,000,000		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.467.789.454
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah materai	3700 Lembar	2,999,500		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah materai	3700 Lembar	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah bulan air dan listrik	12 bulan	785,100,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah bulan air dan listrik	12 bulan	675.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Diskominfo	Jumlah kendaraan Dinas	15 unit	10,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Diskominfo	Jumlah kendaraan Dinas	28 unit	10.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Diskominfo	Jumlah administrasi keuangan	41 orang	480,489,000		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Diskominfo	Jumlah administrasi keuangan	12 bulan	441.444.975



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis kebersihan kantor	20 jenis	30,000,000		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis kebersihan kantor	25 jenis	30.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis alat tulis kantor	35 jenis	30,000,000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis alat tulis kantor	35 jenis	90.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah cetakan dan penggandaan	50,000 lembar	50,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah cetakan dan penggandaan	50,000 lembar	30.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah bahan bacaan	3.938 exp	19,994,400		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah bahan bacaan	10,714 exp	0
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Diskominfo	Jumlah makanan dan minuman	2.500 kotak	75,000,000		Penyediaan Makanan dan Minuman	Diskominfo	Jumlah makanan dan minuman	6000 kotak	35.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diskominfo	Jumlah rapat-rapat koordinasi	27 kali	180,000,000		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diskominfo	Jumlah rapat-rapat koordinasi	150 kali	195.180.000
	Penyediaan Jasa Adm Teknis dan Perkantoran	Diskominfo	Jumlah bulan adm teknis perkantoran	12 bulan	1,392,227,568		Penyediaan Jasa Adm Teknis dan Perkantoran	Diskominfo	Jumlah bulan adm teknis perkantoran	12 bulan	1.132.903.236
	Penyediaan Bandwith	Diskominfo	MBps	100 Mbps	1,244,189,532		Penyediaan Bandwith	Diskominfo	MBps	200 Mbps	1.825.261.243
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	100%	10,041,058,575		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	100%	395.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah bulan	12 bulan	-		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah bulan	12 bulan	0
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis peralatan kantor	5 jenis	1,091,058,575		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis peralatan kantor	5 jenis	30.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis barang	3 jenis	-		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah jenis barang	3 jenis	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Diskominfo	Jumlah kendaraan yang terpelihara	28 unit	-		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Diskominfo	Jumlah kendaraan yang terpelihara	28 unit	100.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Diskominfo	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 unit roda 4	850,000,000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Diskominfo	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		0
	Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio	Diskominfo	Jumlah alat studio TV dan radio yang terpelihara	Paket	100,000,000		Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio	Diskominfo	Jumlah alat studio TV dan radio yang terpelihara	paket	0
	Sewa Disaster Recovery center (DRC)	Jakarta/Batam	Jumlah TeraByte (TB)	20 TB	2,500,000,000		Sewa Disaster Recovery center (DRC)	Jakarta/Batam	Jumlah TeraByte (TB)	20 TB	0
	SMS Gateway, Call Center, dan Broadcast Message	Diskominfo	Jumlah Sms dan Call Center	1 paket	1,500,000,000		SMS Gateway, Call Center, dan Broadcast Message	Diskominfo	Jumlah Sms dan Call Center		0
	Sewa VVN-IP	Kec.Tabang	Jumlah MBps				Sewa VVN-IP	Kec.Tabang	Jumlah MBps		0
	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	18 Kecamatan	Jumlah SKPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	100 SKPD	2,500,000,000		Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	18 Kecamatan	Jumlah SKPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	100 SKPD	150.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Elektrikal	18 Kecamatan	Jumlah kecamatan yang terpelihara	18 Kec	1,500,000,000		Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Elektrikal	18 Kecamatan	Jumlah kecamatan yang terpelihara	18 Kec	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	12 bulan	-		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	12 bulan	15.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100%	150,000,000		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	0%	0
	Pengadaan Pakaian Sipil Harian	Diskominfo	Jumlah Pakaian Sipil Harian		-		Pengadaan Pakaian Sipil Harian	Diskominfo	Jumlah Pakaian Sipil Harian		-
	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	Diskominfo	Jumlah pakaian hari-hari tertentu		150,000,000		Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	Diskominfo	Jumlah pakaian hari-hari tertentu		-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100%	200,000,000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100 %	100.000.000
	Pelatihan, Kursus dan Bimtek PNS/PPPK	Jakarta/Yogyakarta/Bandung		10 orang	200,000,000		Fasilitasi Tim BEKIAS		Jumlah ASN	16 orang	100,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian keuangan	100%	150,000,000		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian keuangan	100 %	350,000,000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Diskominfo	Jumlah berkas laporan keuangan	4 berkas	50,000,000		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Diskominfo	Jumlah berkas laporan keuangan	2 Dokumen	150.000.000
	Pengelolaan Adm Perpajakan SKPD Diskominfo	Diskominfo		12 laporan	50,000,000				Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian keuangan		0
	Penyusunan Renstra	Diskominfo	Jumlah dokumen				Penyusunan Renstra	Diskominfo	Jumlah dokumen	2 Dokumen	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Diskominfo	Jumlah dokumen	5 dokumen	50,000,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Diskominfo	Jumlah dokumen	5 dokumen	200.000.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			100%	26,100,000,000		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Cakupan Layanan E-Government yang terintegrasi	100%	1.700.000.000
			Cakupan Layanan E-Government								
	Implementasi dan Pengembangan e-Government	18 Kecamatan	Jumlah peserta				Integrasi Data Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	5 Aplikasi	500,000,000
	Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik	18 Kecamatan	Jumlah peserta	50 peserta	1,500,000,000		Implementasi Smart Regency/ City	Kec.Tenggarong	Jumlah Layanan	2 Aplikasi Layanan (Kese	400.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

										hatan dan Laya nan Publi k)	
	Pembuatan Road Map e-Government Kab. Kutai Kartanegara	Diskominfo	Jumlah dokumen Road Map e-Government	50 peserta	1,000,000,000		Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi LPSE	18 Kecamatan	Jumlah Peserta	158 Orang, 2 Aplikasi	0
	Pembuatan Road Map TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Pemkab Kutai Kartanegara	Diskominfo	Jumlah dokumen Road Map TIK				Implementasi dan Pengembangan e-Government	18 Kecamatan	Jumlah peserta	50 peserta	0
	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo	Jumlah dokumen Tata Naskah dan Perda TIK	1 dokumen	1,500,000,000		Penyusunan Dokumen e-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0
	Pembuatan SOP Tata Kelola TIK dan Keamanan Informasi	Diskominfo	Jumlah dokumen SOP Tata Kelola TIK dan Keamanan Informasi				Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	3 Aplikasi	800.000.000
	Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Diskominfo	Jumlah aplikasi				Pengelolaan Isu media dan opini Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Isu Media		0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Pengelolaan TIK Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	Kec.sanga-sanga	Jumlah UMKM	2 aplikasi	150,000,000		Sosialisasi, Implementasi dan Penguatan pengelolaan dan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Layanan Informasi Publik	100 peserta	0
	Integrasi Data Layanan	Diskominfo	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	30 UMKM	500,000,000				Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	90% (229/254)	800.000.000
	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Aplikasi LPSE	Diskominfo	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	12 aplikasi	750,000,000		Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK	Long Anai, Lekaq Kidau, Taman Pintar, Waduk Sukarame,	Jumlah Perangkat Jaringan TIK	15 set Wifi	800,000,000
	Sosialisasi dan Bimtek Layanan Publik	Diskominfo	Jumlah peserta yang mendapatkan Bimtek Layanan Publik	3 Aplikasi	500,000,000		Pengelolaan Media Publikasi Internal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Internal	25 media	0
	Pengembangan Smart City	Kec.Tenggarong	Jumlah Smart City	100 peserta	500,000,000		Pengelolaan Program Siaran dan Konten	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Konten Dialog dan Liputan		0
	Kerjasama IT Security Assesment Lemsaneg	Diskominfo	Jumlah dokumen keamanan data	1 paket	3,000,000,000		Optimalisasi Peran Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat	18 Kecamatan	Jumlah Komunitas	50 Komunitas	0
	Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian	18 Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mendapat pembinaan persandian	1 dokumen	300,000,000				Cakupan Layanan Internet Ke sekolah-sekolah		0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara	SKPD	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan peralatan Sandi Negara				Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan Internet	18 Kecamatan	Jumlah Jaringan Internet	30 Jaringan Sekolah	0
	Penyediaan dan Instalasi, konfigurasi Perangkat Core Switching	Tenggarong	Jumlah SKPD yang mendapat pemeliharaan instalasi	9 SKPD	450,000,000				Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Ada	300,000,000
	Pengembangan Ruangan Sandi		Jumlah Ruangan Sandi				Sertifikasi ISO 9001 : 2015 LPSE (Mutu Layanan)		Jumlah dokumen audit ISO 9001 : 2015 LPSE	1 dokumen	300.000.000
	Penguatan Peralatan Pemancar Radio RPK		Jumlah pemancar	1 Paket	1,000,000,000		Audit ISO 27001 (Keamanan Informasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen sertifikasi ISO 27001	1 dokumen	0
			Cakupan Layanan Internet Ke Sekolah-sekolah				Peningkatan sarana pendukung LPSE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah perangkat pendukung	1 Server	0
	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Sekolah	18 Kecamatan	Jumlah sekolah yang dikembangkan dan ditingkatkan jaringannya						Cakupan Implementasi PPID	38% (22/58)	200,000,000
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Wireless	18 Kecamatan	Jumlah jaringan wireless	77 Sekolah	1,000,000,000		Implementasi PPID Kab.Kukar	Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan	6 Pelaksanaan	200,000,000
	Pengembangan Jaringan Kelurahan	8 Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan jaringannya	6 set	2,400,000,000		Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-undangan kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi	17 Kecamatan	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Pengembangan Jaringan Fiber Optic dan Wifi Obyek Wisata	Kec.Tenggarong	Jumlah core (satuan FO)				Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah PPID Pembantu	30 PPID P	0
	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Fiber Optic (FO)	Kec.Tenggarong	Jumlah Km jaringan FO yang dikembangkan	10 core	500,000,000		Pameran Pembangunan	Kec. Sanga-sanga dan Tenggarong	Jumlah Pameran	4 Pameran	0
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Free Hotspot	Kec.Tenggarong	Jumlah core (satuan FO)	10 Km	3,000,000,000						
	Optimalisasi Jaringan SKPD	18 Kecamatan	Jumlah SKPD yang dioptimalkan jaringannya	10 core	500,000,000						
	Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat Video Convergence	18 Kecamatan	Jumlah tempat yang dipelihara dan ditingkatkan	20 SKPD	350,000,000						
	Pengecatan Tower	18 Kecamatan	Jumlah tower yang dicat	22 titik	500,000,000						
	Pengadaan Genset	3 Kecamatan	Jumlah pengadaan genset	4 tower	1,000,000,000						
	Pengelolaan dan Peningkatan Infra Struktur Data Center/NOC	Diskominfo	Jumlah server yang dikelola	1 unit	250,000,000						
	Monitoring dan Evaluasi Jaringan		Jumlah Jaringan	1 server	2,500,000,000						



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

			Tingkat Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	100 SKPD	150,000,000						
	Peningkatan Standarisasi LPSE dan ISO 9001 : 2008	Diskominfo	Jumlah dokumen standarisasi LPSE dan ISO 9001 : 2008								
	Implementasi Penggunaan Aplikasi LPSE	18 Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti penggunaan aplikasi LPSE								
	Sosialisasi dan Bimtek Layanan LPSE	18 Kecamatan	Jumlah peserta layanan LPSE	101 peserta	500,000,000						
	Audit ISO 9001 : 2008 LPSE	Diskominfo	Jumlah dokumen audit ISO 9001 : 2008 LPSE	100 peserta	200,000,000						
	Sertifikasi ISO 27001 (Keamanan Informasi)	Diskominfo	Jumlah dokumen sertifikasi ISO 27001	1 dokumen	50,000,000						
	Audit ISO 27001 (Keamanan Informasi)	Diskominfo	Jumlah dokumen audit ISO 27001	1 dokumen	500,000,000						
	Pelatihan MOT dan TOT LPSE		Jumlah Peserta	1 dokumen	50,000,000						
	Penataan Pembinaan Pengawasan dan Perizinan di Bidang Pos	Kecamatan									



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Sosialisasi Pos Pedesaan	Kecamatan			
	Pembangunan Jaringan Desa	18 Kecamatan	Jumlah desa yang dibangun jaringan		
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Layanan SKPD	33 desa	1,500,000,000
	Implementasi dan Pengembangan IGOS	18 Kecamatan	Jumlah peserta	100%	2,100,000,000
	Sosialisasi Sistem Layanan Informasi	18 Kecamatan	Jumlah peserta	25 peserta	500,000,000
	Bimtek Sistem Layanan Informasi	18 Kecamatan	Jumlah peserta	25 peserta	350,000,000
	Implementasi Penggunaan Aplikasi	18 Kecamatan	Jumlah peserta	25 peserta	500,000,000
	Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network Security)	Yogyakarta	Jumlah orang yang terlatih	25 peserta	500,000,000

	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		Persentase SKPD pengguna layanan Aplikasi Teknologi Informasi	100 %	0
	Implementasi dan Pengembangan IGOS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	200 Peserta	0
	Sosialisasi Sistem Layanan Informasi	18 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan	10 Kali Pelaksanaan	0
	Implementasi Penggunaan Aplikasi	18 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan	10 Kali Pelaksanaan	0
	Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network security)	18 Kecamatan	Jumlah Peserta	100 Peserta	0
	Peningkatan SDM LPSE	18 Kecamatan	Jumlah Peserta	10 Peserta	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Pelatihan Government Cheaf Information Officer (GCIO)		Jumlah orang yang terlatih	10 Orang	250,000,000
	Pelatihan Cheaf of Information Officer (CIO)		Jumlah orang yang terlatih		
	Pelatihan Broadcast dan Jurnalistik		Jumlah orang yang terlatih		
	Diklat Sandiman		Jumlah orang yang terlatih		
	Diklat Media Centre		Jumlah orang yang terlatih		
	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM		
	Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kukar	Kec.Tenggarong	Jumlah KIM yang terbina	100%	800,000,000
	Pelaksanaan Pekan Informasi Nasional (PIN) dan BAKOHUMAS	Luar Daerah	Jumlah PIN	10 KIM	350,000,000

	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	70%	250.000.000
	Bimtak Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah KIM yang Terbina	10 KIM yang terbina	150.000.000
	Pelaksanaan Pekan Informasi Nasional (PIN) / BASKOHUMAS Nasional	Dalam/ Luar Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BAKOHUMAS	2 BAKOHUMAS	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

						Pembentukan Forum Komunikasi (BAKOHUMAS) Daerah	18 Kecamatan	Jumlah OPD dan BUMN Instansi Pemerintah	15 OPD dan BUMN Instansi Pemerintah	0
						Fasilitasi Komunikasi OPD dan FKPD serta Masyarakat	18 Kecamatan	Pertemuan dan Komunikasi	5 kali Pertemuan	0
						Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	18 Kecamatan	Jumlah Komunitas Masyarakat	2 PUSKOMKREF	100.000.000
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	1 PIN	450,000,000	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Cakupan media elektronik, cetak dan media soisal	77%	1.000.000.000
	Penguatan Pertunjukan Rakyat sebagai Media Diseminasi Informasi	Kec.Tenggarong dan Sanga-sanga	Jumlah pertunjukan rakyat	100%	6,593,000,000	Publikasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui Blocking Space	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Informasi dan Advetorial	5 Media Informasi dan 100	1.000.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Pembuatan Naskah Akademik Perda TV dan Pengurus Izin LPP TV Lokal	Diskominfo	Jumlah dokumen Naskah Akademik TV dan Pengurus izin LPP TV Lokal	2 pertunjukan	650,000,000	
Pembuatan Naskah Akademik dan Perda LPPL RPK	Diskominfo	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda LPPL RPK			
Pembuatan Perda LPPL RPK		Jumlah Perda			
Pembinaan dan Pengawasan Radio / TV Kabel	Kecamatan dan desa	Jumlah kecamatan yang terbima dan pengawasan radio TV Kabel			
Pengelolaan Media Centre Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah berita	5 Kecamatan	250,000,000	

			Advet orial	
Advetorial Kebijakan Pemerintah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Advetorial	100 Advet orial	0
Pembinaan dan Pengawasan Radio dan Media Jejaring	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media yang Terbina	25 Medi a yang terbin a	0
Penerbitan Buletin dan Selayang Pandang Kutai Kartanegara	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Exemplar dan Dokumen Video	150 exam plar dan 150 doku men video	0
Peringatan Hari Besar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peringatan Hari Besar	5 Perin gatan hari besar	0
Pengelolaan dan Pengembangan Website Kabupaten, Diskominfo dan PPID	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Website yang terpelihara	5 websi te terpel ihara	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Penerbitan Buletin Kab. Kutai Kartanegara	SKPD dan 18 Kecamatan	Jumlah exemplar	520 berita	150,000,000
Pengelolaan Program Siaran Interaktif Radio RPK dan SKPD	Kec.Tenggarong	Jumlah siaran interaktif	4000 exemplar	148,000,000
Pengelolaan Program Siaran Interaktif LPP TVRI, TV swasta dan TV kabel		Jumlah siaran interaktif	48 siaran interaktif	75,000,000
Kerjasama LPP TVRI, TV swasta dan TV kabel		Jumlah Kerjasama		
Pengelolaan Program Siaran Informasi Daerah Radio RPK	Kec.Tenggarong	Jumlah berita		
Penunjang Pengelolaan Siaran Radio RPK	Kec.Tenggarong	Jumlah program siaran	720 berita	300,000,000
Implementasi PPID Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah implementasi PPID	7 program siaran	250,000,000
Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah buku peraturan Pusat dan daerah	15 kali	400,000,000

Pembuatan Video Profil Kab. Kutai Kartanegara	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Video Profil	150 video profil	0
Peningkatan Expose Multi Media	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen	1 dokumen	0



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Penguatan PPID Pembantu		Kabupaten Kutai Kartanegara	Tersebar nya 100 Buku peraturan Pusat dan Daerah	500,000,000
Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu		Kabupaten Kutai Kartanegara		
Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-undangan Kominfo(semula Program Media Massa)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sosialisasi dan advokasi		
Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rapat anggota PPIDP	Terlaksanan ya Sosialisasi dan Advokasi Sebanyak 10 Kali	500,000,000
Peringatan Harteknas dan Harkitnas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peringatan Harteknas dan Harkitnas	Di Adakannya Pertemuan/R apat Seluruh Anggota PPIDP Sebanyak 10 Kali	300,000,000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Peliputan Publikasi dan Dokumentasi	Kecamatan ,Kab/Provinsi dan luar Daerah	Jumlah liputan dan dokumentasi	Terlaksana Peringatan Hari-Hari Besar	400,000,000
Penayangan Dialog Interaktif Bupati Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dialog interaktif	100 kali	120,000,000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah	48 dialog interaktif	75,000,000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Mobil Pustaka	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyebarluasan informasi melalui mobil Pustaka	200 kali	100,000,000
Pameran Pembangunan	Kec.Sanga-sanga, Tenggarong dan luar Daerah	Jumlah pameran	50 kali	75,000,000
Pengelolaan Hosting, Domain, dan Portal Kabupaten	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah berita	5 kali	150,000,000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Pembuatan Video Profile Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah video profile	772 berita	500,000,000
	Pengelolaan Website diskominfo	Diskominfo	Jumlah website	500 buah	750,000,000
	Pengelolaan Website PPID Kabupaten	Diskominfo	Jumlah website		
	Peningkatan Expose Multi Media	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah exspose Multi Media	384 berita	400,000,000
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Sektoral			192 kali	500,000,000
	Pengumpulan data dan statistik sektoral		Blangko Pendataan umum Kab. Kutai Kartanegara		
	Penyusunan data dan statistik sektoral		Buku pendataan umum Kab. Kutai Kartanegara		
	Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara		Buku PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara; Buku PDRB Kecamatan		

	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Cakupan Data Statistik Daerah	100 %
			<i>Tersedianya Sistim Data dan Statistik yang Terintegrasi</i>	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
			Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada
				200.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		Buku NTP, ICOR, IHK, INFLASI			Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (Inovasi Data Kukar)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000
	Survey Indikator Sosial Ekonomi Daerah		Buku Survey Indikator Sosial Ekonomi Daerah			Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kukar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0
	Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah		Buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah					Buku PDRB	Ada	500.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Indikator Sosial Ekonomi Daerah		Buku Survey dan Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah			Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	350.000.000
	Kerjasama Indikator Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Kab. Kutai Kartanegara		Jumlah Dokumen			Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Persentase aplikasi yang telah diproteksi	17%	150.000.000
						Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi dan MoU	4 Aplikasi dan 1 MoU	150.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

							Kerjasama IT Security Assesment Lemsaneg	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah MOU	1 MOU	0
							Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian	18 Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi	22 Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi	0
							Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara	SKPD	Jumlah Peralatan Sandi Negara	18 Peralatan Sandi Negara	0



2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



BAB III

Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Komunikasi dan Informatika

1. Program prioritas Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh kecamatan desa dan kelurahan.
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi melalui pelatihan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi melalui pembentukan dan bimbingan teknis kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan/Desa.
4. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM bidang Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010



tentang Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang dijadikan indikator pelayanan dinas.

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2016 menjadi acuan dalam pelaksanaa pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah utama dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1. Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara SmartCity

Secara garis besar pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara di era sekarang ini sangat diperlukan guna pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan pengembangan kota cerdas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirancangguna membantu berbagai hal kegiatan mesayarakat, terutama dalam upaya pengelolaan Sumber Daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi. Pengembangan aplikasi yang ada pada setiap SKPD untuk dapat mengintgrasikan data layanan informasi.

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektonik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi. Sistem pengadaan yang dibangun merupakan media bagi proses



pengadaan barang/ jasa pemerintah yang diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah. Fungsi fasilitasi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik untuk pengguna layanan meliputi PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), PP (Pejabat Pengadaan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Auditor dan Penyedia.

Dalam peningkatan layanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai diamanatkan dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 9 Tahun 2015 tentang peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, diwajibkan untuk semua Layanan pengadaan secara elektronik untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh LKPP. Standar tersebut ada 17 standar yang harus dipenuhi meliputi diantaranya standar organisasi, layanan, keamanan informasi, pengelolaan server serta pengelolaan sumber daya manusia.

3. Satu Data Layanan untuk Pembangunan Kutai Kartanegara

Data yang digunakan oleh aplikasi yang saat sekarang dikembangkan di beberapa SKPD belum memiliki keseragaman struktur dikarenakan belum adanya standar baku yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam membangun/mengembangkan aplikasi yang sesuai kebutuhan masing masing SKPD.

Kondisi ini menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses integrasi data. Untuk itu pemerintah harus memiliki standar baku yang disepakati bersama yang dapat dijadikan patokan dalam setiap pembuatan/pengembangan aplikasi di setiap SKPD.



Integrasi data merupakan sebuah proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber dalam rangka mendukung management Informasi dan mendukung penggunaan untuk melihat kesatuan data.

Integrasi data mengharuskan semua komponen menggunakan sumber data yang sama yang sudah terferifikasi oleh instansi terkait dan menghindari terjadinya duplikasi atau adanya data ganda.

4. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan satu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui berbagai aplikasi yang bersifat On-Line.

5. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam



berbagai kemasan dengan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Setiap informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses serta alasan pembuatan kebijakan publik. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik, seperti yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tingginya kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat dewasa ini, dengan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan akses internet melalui jaringan free WiFi dan jaringan 4G, alat teknologi penunjang kemudahan transaksi dan kemampuan bertukar data digital secara jarak jauh melalui internet menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita sedang memasuki tahap sebagai masyarakat informasi. Ini adalah salah satu bukti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

A. TUJUAN

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya tidak terlepas dan merupakan bagian yang terintegrasi dari perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni *“Terwujudnya Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”*. Serta selaras dengan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yakni mewujudkan Masyarakat Indonesia menjadi *Masyarakat Informasi*.

Penetapan Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara disamping harus berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara yaitu *“Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang Komunikasi dan Informatika”*. Dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021

Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara *Smart City* diharapkan diperoleh



manfaat antara lain, Bagi Pemerintah Daerah yakni, Memudahkan komunikasi antar unit kerja, Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data, Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah dan Bagi Masyarakat akan peroleh manfaat Kemudahan akses internet, untuk berbagai aktivitas, Mendapatkan layanan yang lebih Cepat, Mudah dan Murah, Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat informasi (*Information Society*) dengan merubah diri secara gradual dari masyarakat yang bergantung sumber daya alam *resource based society* menjadi masyarakat yang berbasis Informasi dan Ilmu Pengetahuan *Information and Knowledge based society dimana* masyarakat informasi ditandai dengan a. hadirnya karya-karya bidang Informasi; b. Volume arus informasi yang sangat besar; c. Interaktivitas relasi-relasi; d. Integrasi dan konvergency aktivitas-aktivitas, e. Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan; f. Kecenderungan mengglobal; g. Budaya post modern; h. Dan perubahan lainnya.

Serta berlandaskan pada agenda Dunia Dalam World Summit On Information Society (WSIS), Geneve, Dec 2003:

1. Kesempatan untuk mewujudkan masyarakat informasi di setiap negara;
2. Mengupayakan agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga Pemerintahan terhubung dalam suatu jaringan;



3. Interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan diseluruh dunia secara mudah dan cepat dengan perantara teknologi dan komunikasi.

B. SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Melaksanakan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Menciptakan tertib Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
4. Mewujudkan Sistem Informasi Layanan Pemerintahan dan Publik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).



Sasaran :

Meningkatnya penyebaran teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan adalah 10 program, terdiri dari empat program Non Urusan dan enam program Urusan wajib, dengan total kegiatan 78 kegiatan. Dengan Pagu indikatif untuk menjalankan program keseluruhan adalah Rp. 39.906.958.575,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :





BAB IV

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Komunikasi dan Informatika								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	4.467.789.454			100%	10.115.900.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Dinas Komunikasi dan Informatika	3700 Lembar	3.000.000	APBD		3700 Lembar	25.900.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan air dan listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	675.000.000	APBD		12 bulan	1.000.000.000



RencanaKerjaDiskominfoKabupaten Kutai Kartanegara2019

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	28 unit	10.000.000	APBD		28 unit	35.000.000
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	441.444.975	APBD		12 bulan	1.000.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis kebersihan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	25 jenis	30.000.000	APBD		25 jenis	150.000.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	35 jenis	90.000.000	APBD		35 jenis	130.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	50,000 lembar	30.000.000	APBD		50,000 lembar	400.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,714 exp	0	APBD		10,714 exp	75.000.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Dinas Komunikasi dan Informatika	6000 kotak	35.000.000	APBD		6000 kotak	300.000.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	150 kali	195.180.000	APBD		150 kali	1.000.000.000
				Penyediaan Jasa Adm Teknis dan Perkantoran	Jumlah bulan adm teknis perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	1.132.903.236	APBD		12 bulan	1.500.000.000
				Penyediaan Bandwith	Mbps	Dinas Komunikasi dan	200 Mbps	1.825.261.243	APBD		200 Mbps	4.500.000.000



RencanaKerjaDiskominfoKabupaten Kutai Kartanegara2019

						Informatika						
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan		100%	395.000.000			100%	6.601.058.575
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	0	APBD		12 bulan	300.000.000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 jenis	30.000.000	APBD		5 jenis	1.091.058.575
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis barang	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 jenis	0	APBD		3 jenis	10.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	28 unit	100.000.000	APBD		28 unit	250.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	APBD			0
				Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio	Jumlah alat studio TV dan radio yang terpelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	paket	0	APBD		paket	100.000.000
				Sewa DisasterRecoverycenter (DRC)	Jumlah TeraByte (TB)	Jakarta/Batam	20 TB	0	APBD		20 TB	2.500.000.000
				SMS Gateway dan BroadcastMessage	Jumlah Sms dan Call Center	Dinas Komunikasi dan Informatika			APBD			



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

				Sewa VVN-IP	Jumlah MBps	Kec. Tabang			APBD			
				Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	Jumlah SKPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	18 Kecamatan	81 SKPD	150.000.000	APBD		100 SKPD	1.000.000.000
				Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mekanikal Elektrikal	Jumlah kecamatan yang terpelihara	18 Kecamatan	18 Kec	100.000.000	APBD		18 Kec	1.000.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	350.000.000
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai			0				0
				Pengadaan Pakaian Sipil Harian	Jumlah Pakaian Sipil Harian	Dinas Komunikasi dan Informatika		-	APBD		0	-
				Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika		-	APBD			-
			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai		100%	100.000.000				200.000.000
				Fasilitasi Tim BEKIAS	Jumlah ASN		16 Orang	100.000.000	APBD		20 orang	200.000.000
			5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	350.000.000			100%	250.000.000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Jumlah berkas laporan keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000



RencanaKerjaDiskominfoKabupaten Kutai Kartanegara2019

					Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja						
				Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	0	APBD	2 Dokumen	50.000,000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 dokumen	200.000.000	APBD	5 dokumen	100.000.000
			6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan E-Government yang terintegrasi		52% (31/60)	1.700.000.000		100%	3.300.000.000
				Integrasi Data Layanan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 aplikasi	500.000.000	APBD	5 aplikasi	500.000.000
				Implementasi Smart Regency/ City	Jumlah Layanan	Kec.Tenggarong	2 Aplikasi Layanan (Kesehatan dan Layanan Publik)	400.000.000	APBD	2 Aplikasi Layanan (Kesehatan dan Layanan Publik)	400.000.000
				Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi LPSE	Jumlah Peserta	18 Kecamatan	158 Orang, 2 Aplikasi	-	APBD	158 Orang, 2 Aplikasi	250.000.000
				Implementasi dan Pengembangan e-Government	Jumlah peserta	18 Kecamatan	50 peserta	-	APBD	50 peserta	500.000.000
				Penyusunan Dokumen e-Government	Jumlah Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	500.000.000
				Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Informasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Dinas Komunikasi dan	3 Aplikasi	800.000.000	APBD	3 Aplikasi	350.000.000



RencanaKerjaDiskominfoKabupaten Kutai Kartanegara2019

				(Aplikasi)		Informatika						
				Pengelolaan Isu media dan opoini Publik	Jumlah Isu Media	Dinas Komunikasi dan Informatika		-	APBD			300.000.000
				Sosialisasi, Implementasi dan Penguatan pengelolaan dan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 peserta	-	APBD		100 peserta	500.000.000
					Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan		90% (229/254)	800.000.000				8.800.000.000
				Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK	Jumlah Perangkat Jaringan TIK	Long Anai, LekaqKidau, Taman Pintar, Waduk Sukarame,	15 set Wifi	800.000.000	APBD		6 set Wifi, 10 core FO, 10 km FO, 10 titik jaringan SKPD	5.000.000.000
				Pengelolaan Media Publikasi Internal	Jumlah Media Internal	Kab. Kutai Kartanegara	25 media	0	APBD		25 media	3.000.000.000
				Pengelolaan Program Siaran dan Konten	Jumlah Konten Dialog dan Liputan	Kab. Kutai Kartanegara		0	APBD			500.000.000
				Optimalisasi Peran Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas	18 Kecamatan	50 Komunitas	0	APBD		50 Komunitas	300.000.000
					Cakupan Layanan Internet Ke sekolah-sekolah			0				1.000.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

				Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan Internet	Jumlah Jaringan Internet	18 Kecamatan	30 Jaringan Sekolah	0	APBD		77 Jaringan Sekolah	1.000.000.000
					Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa		Ada	300.000.000				150.000.000
				Sertifikasi ISO 9001 : 2015 LPSE (Mutu Layanan)	Jumlah dokumen audit ISO 9001 : 2015 LPSE	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
				Audit ISO 27001 (Keamanan Informasi)	Jumlah dokumen sertifikasi ISO 27001	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	50.000.000
				Peningkatan sarana pendukung LPSE	Jumlah perangkat pendukung	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 server	0	APBD		1 dokumen	50.000.000
					Cakupan Implementasi PPID		38% (22/58)	200.000.000				900.000.000
				Implementasi PPID Kab.Kukar	Jumlah Pelaksanaan	Kab. Kukar	6 Pelaksanaan	200.000.000	APBD		6 Pelaksanaan	250.000.000
				Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-undangan kominfo	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	17 Kecamatan	0	APBD		17 Kecamatan	150.000.000
				Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	Jumlah PPID Pembantu	Dinas Komunikasi dan Informatika	30 PPIDP	0	APBD		30 PPIDP	150.000.000
				Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran	Kec. Sanga-sanga dan	4 Pameran	0	APBD		4 Pameran	350.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

						Tenggarong						
			7	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase SKPD pengguna layanan Aplikasi Teknologi Informasi		100%	0			100%	1.400.000.000
				Implementasi dan Pengembangan IGOS	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara	200 Peserta	0	APBD		200 Peserta	300.000.000
				Sosialisasi Sistem Layanan Informasi	Jumlah Pelaksanaan	18 Kecamatan	10 Kali Pelaksanaan	0	APBD		10 Kali Pelaksanaan	300.000.000
				Implementasi Penggunaan Aplikasi	Jumlah Pelaksanaan	18 Kecamatan	10 Kali Pelaksanaan	0	APBD		10 Kali Pelaksanaan	150.000.000
				Pelatihan SDM (Software, Hardware, dan Network security)	Jumlah Peserta	18 Kecamatan	100 Peserta	0	APBD		100 Peserta	500.000.000
				Peningkatan SDM LPSE	Jumlah Peserta	18 Kecamatan	10 Peserta	0	APBD		10 Peserta	150.000.000
			8	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM		70%	250.000.000			100%	730.000.000
				Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah KIM yang Terbina	Kab. Kutai Kartanegara	10 KIM yang terbina	150.000.000	APBD		10 KIM yang terbina	250.000.000
				Pelaksanaan Pekan Informasi Nasional (PIN) / BASKOHUMAS Nasional	Jumlah BAKOHUMAS	Dalam/ Luar Kab. Kutai Kartanegara	2 BAKOHUMAS	0	APBD		2 BAKOHUMAS	150.000.000
				Pembentukan Forum Komunikasi (BAKOHUMAS) Daerah	Jumlah OPD dan BUMN Instansi Pemerintah	18 Kecamatan	15 OPD dan BUMN Instansi	0	APBD		15 OPD dan BUMN Instansi	150.000.000



RencanaKerjaDiskominfoKabupaten Kutai Kartanegara2019

							Pemerintah				Pemerintah	
				Fasilitasi Komunikasi OPD dan FKPD serta Masyarakat	Pertemuan dan Komunikasi	18 Kecamatan	5 kali Pertemuan	0	APBD		5 kali Pertemuan	50.000.000
				Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	Jumlah Komunitas Masyarakat	Kec. Sanga-Sanga, Kec. Tenggarong dan Kec Kota Bangun	2 PUSKOMKREF	100.000.000	APBD	pendukung prioritas daerah ekonomi kreatif	3 PUSKOMKREF	130.000.000
			9	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Cakupan media elektronik, cetak dan media soisal		77%	1.000.000.000				3.500.000.000
				Publikasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Media Informasi dan Advetorial	Kab. Kutai Kartanegara	5 Media Informasi dan 100 Advetorial	1.000.000.000	APBD		25 Media Informasi	3.000.000.000
				Advetorial Kebijakan Pemerintah	Jumlah Advetorial	Kab. Kutai Kartanegara	100 Advetorial	-	APBD		100 Advetorial	150.000.000
				Pembinaan dan Pengawasan Radio dan Media Jejaring	Jumlah Media yang Terbina	Kab. Kutai Kartanegara	25 Media yang Terbina	-	APBD		25 Media yang Terbina	150.000.000
				Penerbitan Buletin dan Selayang Pandang Kutai Kartanegara	Jumlah Exemplar dan Dokumen Video	Dinas Komunikasi dan Informatika	150 Exemplar dan 150 Dokumen Video	-	APBD		150 Exemplar dan 150 Dokumen Video	50.000.000
				Peringatan Hari Besar	Jumlah Peringatan Hari Besar	Kab. Kutai Kartanegara	5 Peringatan Hari Besar	-	APBD		5 Peringatan Hari Besar	50.000.000



RencanaKerjaDiskominfoKabupaten Kutai Kartanegara2019

				Pengelolaan dan Pengembangan WebsiteKabuipaten, Diskominfo dan PPID	Jumlah Website yang terpelihara	Kab. Kutai Kartanegara	5 Website yang terpelihara	-	APBD		5 Website yang terpelihara	50.000.000
				Pembuatan Video Profil Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Video Profil	Dinas Komunikasi dan Informatika	150 Video Profil	-	APBD		150 Video Profil	50.000.000
				Peningkatan Expose Multi Media	Jumlah Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			10	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan Data Statistik Daerah		100%	0			100%	250.000.000
					Tersedianya Sistim Data dan Statistik yang Terintegrasi							
				Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	250.000.000
					Buku Kabupaten Dalam Angka		Ada	200.000.000				500.000.000
				Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (Inovasi Data Kukar)	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
				Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	250.000.000
					Buku PDRB		Ada	500.000.000				500.000.000



Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

				Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (kabupaten dan Kecamatan dan PDRB Penggunaan)	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	350.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
				Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUEDA)	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
			11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase aplikasi yang telah diproteksi		17%	150.000.000			100%	500.000.000
				Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jumlah Aplikasi dan MoU	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Aplikasi dan 1 MoU	150.000.000	APBD		5 Aplikasi	150.000.000
				Kerjasama IT Security Assessment Lemsaneg	Jumlah MOU	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 MOU	-	APBD		1 MOU	100.000.000
				Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi	18 Kecamatan	22 Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi	-	APBD		22 Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi	100.000.000
				Peningkatan dan Pengembangan Pendukung Peralatan Sandi Negara	Jumlah Peralatan Sandi Negara	SKPD	18 Peralatan Sandi Negara	-	APBD		18 Peralatan Sandi Negara	150.000.000
								10.412.789.454				23.346.958.575



PENUTUP

RencanaKerjaDinasKomunikasi Dan InformatikaTahun 2019merupakanbagian yang takterpisahkandariRencanaStrategisDinasKomunikasi Dan Informatika yang memuatTujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDinasKomunikasi Dan InformatikaKabupatenKutaiKartanegara, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakanpenjabarandariRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenKutaiKartanegaraTahun 2005-2025, sertamerupakankesinambungandariRencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) PemerintahKabupatenKutaiKartanegara.

4.1. CatatanPenting

RencanaKerjaDinasKomunikasi Dan InformatikaKabupatenKutaiKartanegaraTahun 2019akanmenjadipedomanpelaksanaanpembangunan pada tahun 2019. Yang mengacukepadaRencanaStrategis (RENSTRA) DinasKomunikasi Dan InformatikaKabupatenKutaiKartanegara Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenKutaiKartanegara 2016-2021 UrusanWajibKomunikasi Dan Informatika. Sedangkanapabilaterjadiketersediaananggarantidaksesuaidengankebutuhanmembuatskal aprioritaspenganggaran dan selanjutnyadilakukanusulanpenambahananggaran pada saatperubahananggarantahunberjalan, dan mengacu pada program prioritassebagaimanatercantumdalam RPJMD KabupatenKutaiKartanegaraTahun 2016-2021.

4.2. Kaidah-kaidahPelaksanaan

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenKutaiKartanegaratahun 2016-2021 merupakanpedomanbagiPerangkat Daerah (PD) dalammenyusunRencanaStrategis (Renstra) PD, RencanaKerja (Renja) PD, RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungandenganhaltersebut, makaditetapkankaidah-kaidahpelaksanaan RPJMD KabupatenKutaiKartanegaraTahun 2016-2021 sebagaiberikut :

1. Perangkat Daerah (PD) KabupatenKutaiKartanegaradengandidukung oleh seluruh*stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajibanuntukmelaksanakan program-program dalamRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2016- 2021 dengansebaik-baiknya;
2. Bupati, dalammenjalankantugaspenyelenggaraanpemerintahandaerahberkewajibanuntukmeng arahkanpelaksanaan RPJMD KabupatenKutaiKartanegaraTahun 2016-2021 denganmengarahkansemuapotensi dan kekuatandaerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajibanmengkoordinasikanpelaksanaan RPJMD KabupatenKutaiKartanegaraTahun 2016-2021;
4. Perangkat Daerah (PD) KabupatenKutaiKartanegaraberkewajibanuntukmenyusunRencanaStrategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, KegiatanPokok dan



Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan media terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dan mulainya sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, 13 Juli 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,

Ir. H. BAHTERAMSIAH. MM
Pembina Utama Muda



NIP. 19620327 198603 1 023

Nama	Jabatan	Paraf
Drs. H. Tajuddin	Sekretaris	
Saifuddin, SE	Kasub.bag Penyusunan Program dan Keuangan	